

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI
DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA PARBULUAN VI
KAB. DAIRI**

SKRIPSI

OLEH:

**ELIDA SIHOTANG
178330210**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI
DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA PARBULUAN VI
KAB. DAIRI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



**OLEH:
ELIDA SIHOTANG
NPM: 178330210**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi
Nama : **ELIDA SIHOTANG**
NPM : 17.833.0210
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing


(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)

Pembimbing

Mengetahui :



(Drs. Agus Efendi, SE., M.Si)

Dekan


(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 18/Agustus/2021

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 18 Agustus 2021



Elida Sihotang
NPM: 17.833.0210

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elida Sihotang
NPM : 17.833.0210
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

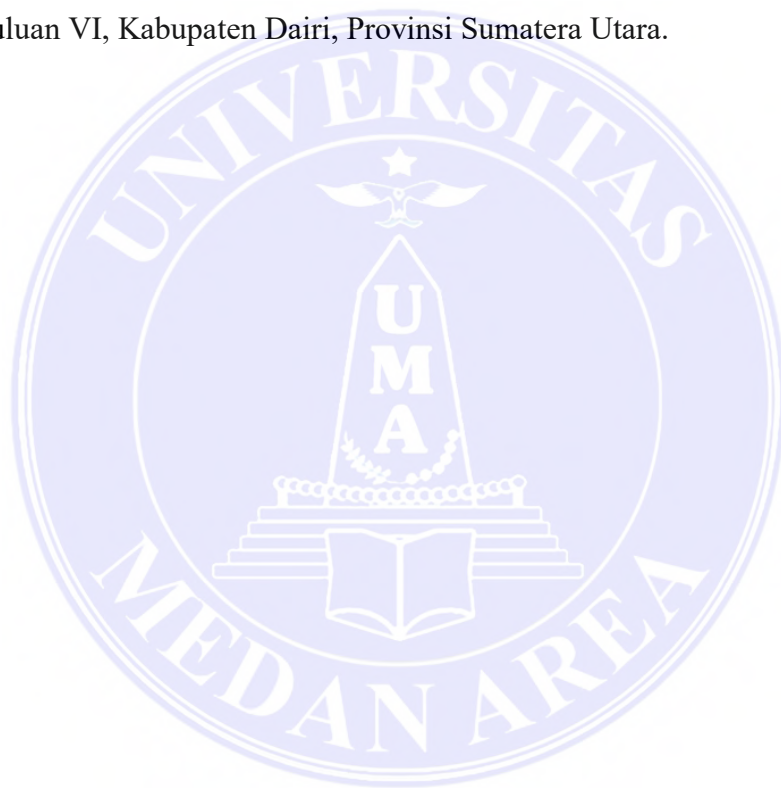
Dibuat di : Medan
Pada tanggal: 18 Agustus 2021



Elida Sihotang
NPM: 17.833.0210

RIWAYAT HIDUP

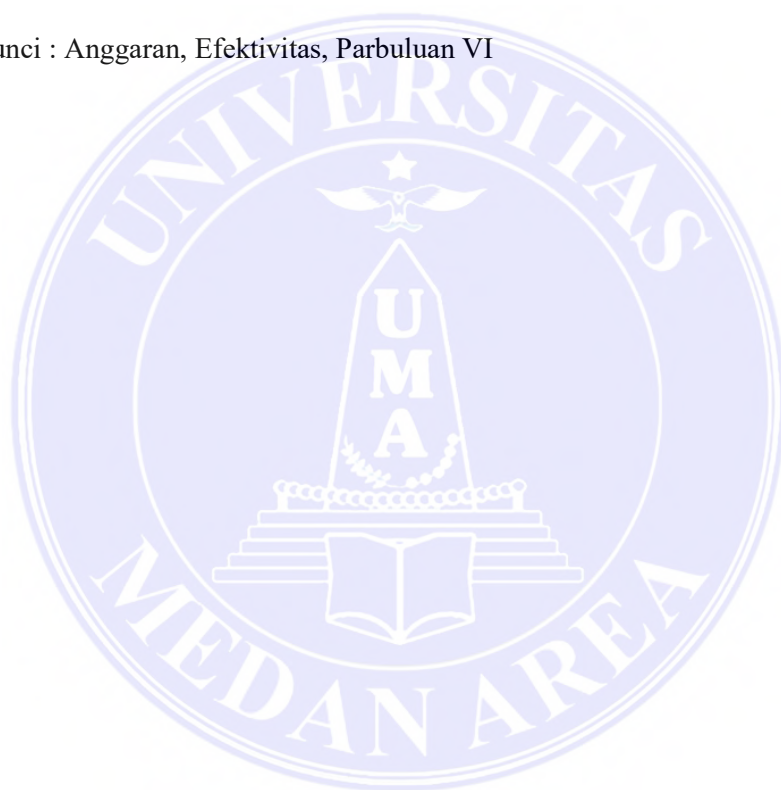
Penulis dilahirkan di Huta Tele Desa Parbuluan VI pada tanggal 04 Oktober 1999 dari ayah yang bernama Marudut Sihotang dan ibu yang bernama Norita Sagala. Penulis merupakan Putri Pertama dari dua orang bersaudara. Tahun 2017 penulis lulus dari SMK HKBP Sidikalang dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama perkuliahan penulis menjabat sebagai Koordinator Edukasi organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI FEB-UMA) Periode 2019-2020. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menggambarkan proses Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Parbuluan VI, Kab.Dairi, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemamfaatan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Parbuluan VI , Kab.Dairi serta untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi. Metodologi yang digunakan pada penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan teknik analisis data yang berasal dari hasil wawancara serta analisis dokumen terkait untuk anggaran serta efektivitas pada realisasi pembangunan infrastruktur. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sudah dikategorikan sudah efektif, dikarenakan masih terdapat sebagian anggaran yang masih belum terealisasi sepenuhnya.

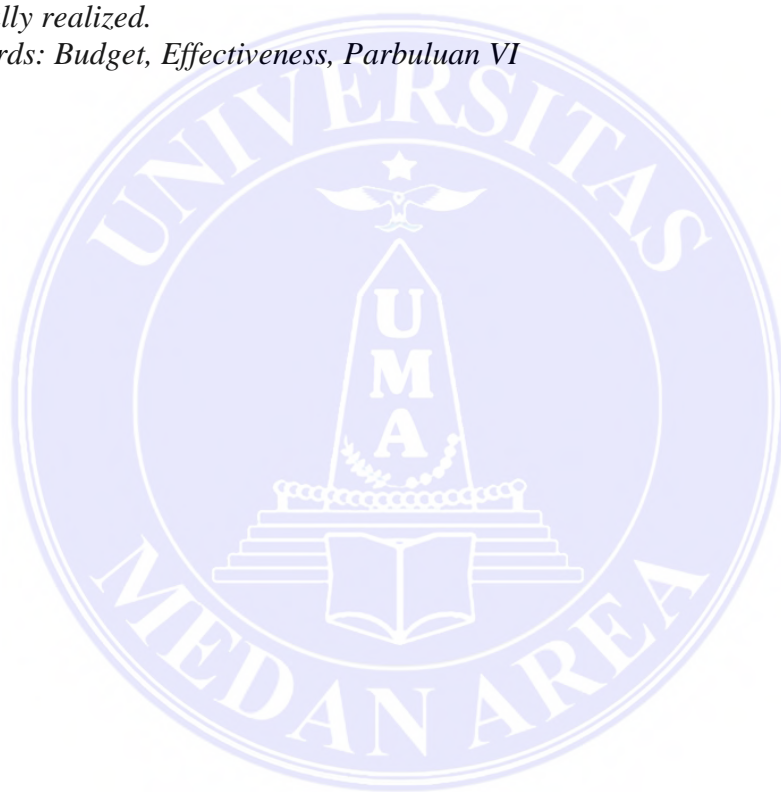
Kata Kunci : Anggaran, Efektivitas, Parbuluan VI



ABSTRACT

This study aims to identify and describe the process of Village Infrastructure Development in Parbuluan VI Village, Dairi Regency, this study also aims to describe how the use of Village Fund Allocations in improving development in Parbuluan VI Village, Dairi Regency and to determine the effectiveness of the utilization of village fund allocations under construction in Parbuluan VI Village, Kab. Dairi. The methodology used in this research is descriptive with a quantitative approach, with data analysis techniques derived from interviews and analysis of related documents for the budget and effectiveness in the realization of infrastructure development. The location of this research was carried out in Parbuluan VI Village, Parbuluan District, Dairi Regency, North Sumatra Province. The results of this study indicate that infrastructure development has been categorized as quite effective, because there is still a budget that has not been fully realized.

Keywords: Budget, Effectiveness, Parbuluan VI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya saya masih diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini. Skripsi penelitian ini disusun dengan tujuan untuk melaksanakan penelitian yang dilaksanakan di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi, Sumatera Utara dengan judul **“Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi”**.

Dalam penulisan skripsi penelitian ini, peneliti menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

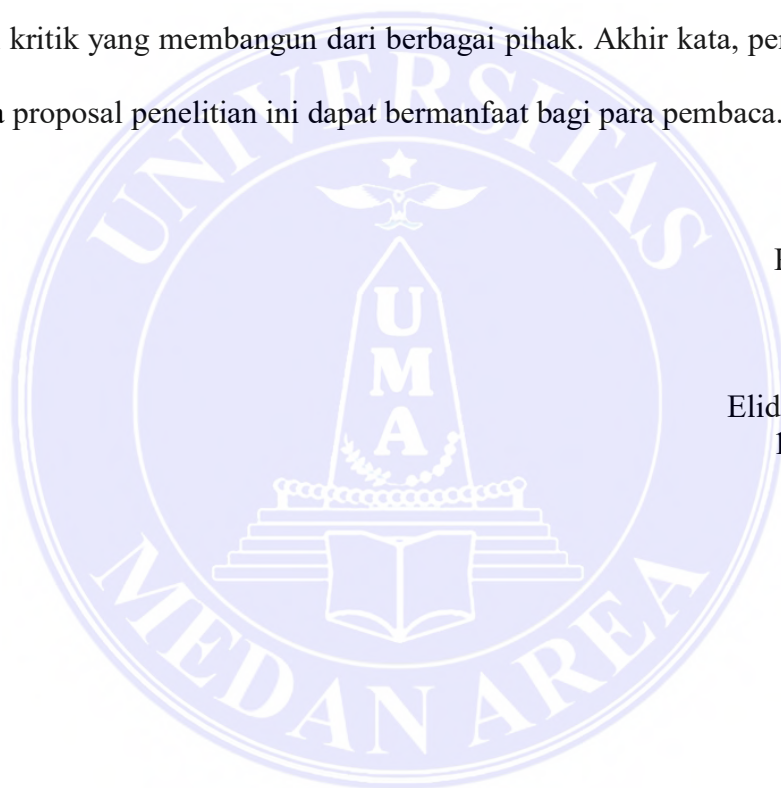
1. Kedua orang tua tercinta Bapak Marudut Sihotang dan Ibu Norita Sagala, dan juga adik tersayang Domister Sihotang, Serta keluarga besar Op. Elida Sihotang, Serta Keluarga besar Op. Lamtiur Sagala yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr.Ihsan Effendi, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.

4. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, M.Acc, Ak Selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan proposal penelitian ini.
5. Ibu Atika Rizki S.E, M.SAk sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan proposal penelitian ini.
6. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si sebagai Ketua Pelaksana pada ujian skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Bapak Alm Eky Ermal M, SE, M.Si, MAFin sebagai Sekertaris Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan proposal penelitian ini.
8. Ibu Rana Fathinah Anandah S.E, M.Si sebagai sekertaris yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan penelitian ini.
9. Seluruh dosen dan staff pegawai yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan kepada saya.
10. Kedapa Bapak Kepala desa, Jabengar Sihotang dan aparat desa yang telah membantu saya dalam menyusun penelitian ini serta yang telah bersedia memberikan data anggaran desa.
11. Teman seperjuangan saya, Evita Panggabean, Meilizah Andriani, Sindi Pratiwi, Adam Tambunan, Sarvay Iin Siregar, Ruth Tamara Tarigan, Notatema Daeli, Garend Bulolo, Lamhot Simbolon, dan Doni Tambunan serta teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2017 grup A4 pagi

lainnya yang telah mendukung dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Rambow Marpaung yang telah memberikan semangat, dukungan baik moril maupun materil serta doa dalam penulisan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran ataupun masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, peneliti berharap semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.



Penulis

Elida Sihotang
178330210

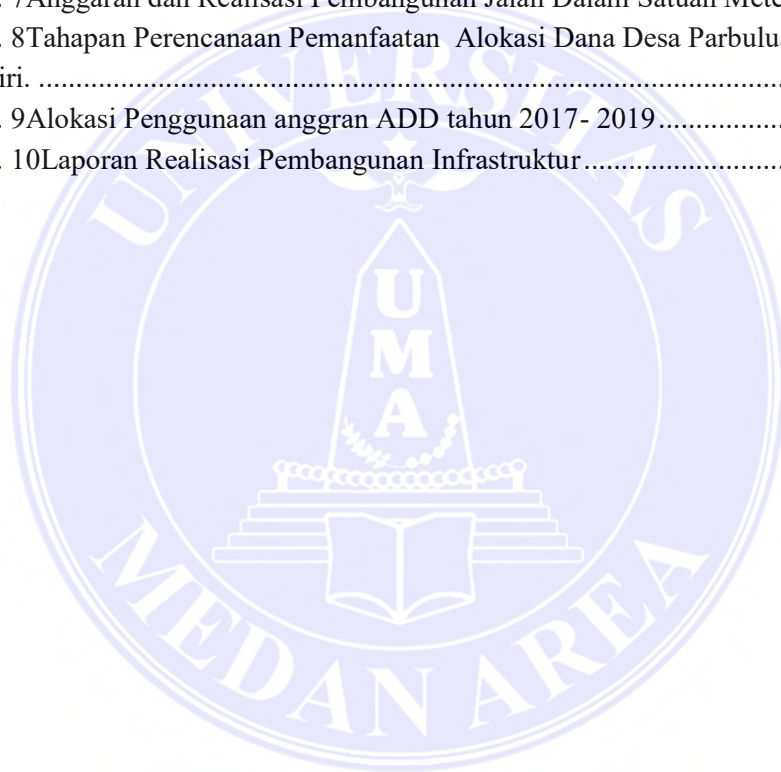
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Teori.	6
2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	6
2.1.2 Pengertian Desa	7
2.1.3 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa	7
2.2 Dana Desa	8
2.2.1 Pengertian Dana Desa.....	8
2.2.2 Pengelolaan Dana	9
2.3 Alokasi Dana Desa (ADD).....	10
2.4 Pembangunan Desa	11
2.5 Konsep Efektivitas	13
2.6 Ukuran Efektivitas.....	14
2.7 Penelitian Terdahulu	15
2.8 Kerangka Pemikiran	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.1.1 Jenis Penelitian	20
3.1.2 Lokasi Penelitian	20
3.1.3 Waktu Penelitian	20
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	21
3.2.1 Populasi.....	21
3.2.2 Sampel.....	21
3.3 Defenisi Operasional	22
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	23

3.4.1	Jenis Data	23
3.4.2	Sumber Data	23
3.5	Teknik Pengumpulan Data	23
3.6	Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		25
4.1	Gambaran Umum Desa	25
4.1.1	Sejarah Desa Parbuluan VI.....	25
4.1.2	Letak Geografis Desa Penelitian.....	26
4.1.3	Kondisi Wilayah dan Kependudukan atau Demografis	26
4.1.4	Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Parbuluan VI	28
4.1.5	Struktur organisasi Pemerintahan Desa Parbuluan VI Kab. Dairi.....	28
4.1.6	Deskripsi Narasumber.	30
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	32
4.2.1	Tahapan Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Parbuluan VI Kab.Dairi.....	32
4.2.2	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Parbuluan VI	36
4.2.3	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi Telah Berjalan Efektif.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		49
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN.....		53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3. 1 Rencana Waktu Penelitian.....	20
Tabel 3. 2 Defenisi Operasional	22
Tabel 4. 1 Daftar Kepala Desa serta Masa Jabatan.....	25
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk	27
Tabel 4. 3 Karakteristik Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel 4. 4 Karakteristik Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 4. 5 Karakteristik Narasumber Berdasarkan Usia.....	31
Tabel 4. 6 Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	33
Tabel 4. 7 Anggaran dan Realisasi Pembangunan Jalan Dalam Satuan Meter.	37
Tabel 4. 8 Tahapan Perencanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Parbuluan VI Kab.Dairi.	37
Tabel 4. 9 Alokasi Penggunaan anggran ADD tahun 2017- 2019.....	40
Tabel 4. 10 Laporan Realisasi Pembangunan Infrastruktur.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	19
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Parbuluan VI	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Rekapitulasi Wawancara	53
Lampiran 2 Surat Research	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan seluruh proses dari sistem penyelenggaraan negara dan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Upaya pemerintah tersebut diperkuat dengan diberlakukannya sebuah sistem yang disebut dengan Otonomi Daerah, dimana Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sebagaimana daerah tersebut akan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 33 Tahun 2004).

Keberhasilan suatu otonomi daerah sejalan dengan keberhasilan setiap desa-desa dalam melaksanakan sistem pemerintahannya diseluruh aspek pemerintahan, dimana salah satu aspek tersebut adalah aspek bidang pembangunan desa yang sangat vital untuk keberhasilan sebuah daerah tersebut. Pengertian desa sendiri adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya terdapat batas-batas wilayah yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola tatanan pemerintahannya. Kepentingan masyarakat didalamnya dengan keikutsertaan ide atau prakarsa masyarakatnya serta hak-hak tradisional masyarakat yang diakui dan dihormati dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Keberhasilan sebuah desa dalam melaksanakan pembangunan desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangannya sebuah desa diikat oleh sebuah peraturan yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri yang ditetapkan dalam (Permendagri No. 20 Tahun 2019) tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar pemerintah desa tidak keluar dari jalur dalam mencapai tujuan dari pembangunan desa. Peraturan mengenai keuangan desa juga tercantum dalam (UU 32 tahun 2004 dan PP 72 tahun 2005) dimana peraturan tersebut membahas sumber - sumber pendapatan desa yang berasal dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain.

Berdasarkan (UU 32 tahun 2004 dan PP 72 tahun 2005) Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintah yaitu hubungan keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Untuk mencapai keselarasan dalam proses kesepakatan hubungan keuangan maka pemahaman tentang kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa sangat perlu diketahui oleh pemerintah desa. Artinya anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 bahwasanya sebagai sumber pendapatan desa, dana bantuan kepada desa dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa yang berada dalam wilayah daerah tersebut dilakukan secara proposional sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Perealisasi ADD disetiap desa akan berbeda-beda sesuai dengan kebijakan oleh pemerintah desa tersebut, dimana menurut hasil penelitian Rohmah & Ma'ruf (2016) menunjukkan bahwa pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Desa Bektiharjo sudah berjalan dengan baik, namun pada beberapa variabel tertentu masih sangat kurang. Pada variabel transparansi menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bektiharjo dalam melakukan pembangunan infrastruktur masih belum transparan, karena belum mampu menyediakan fasilitas dan akses informasi yang mudah untuk masyarakat. Dan Hasil penelitian Boedijono, Wicaksono, Puspita et al. (2019) menunjukkan bahwa desa yang berada di Kabupaten Bondowosotelah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dan sesuai dengan observasi yang dilakukan penulis pada saat melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dimana, di Desa Parbuluan VI tersebut sedang dalam tahap pengembangan ataupun pembangunan dari segi kesehatan laporan keuangan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Untuk itu peneliti berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur Di Desa Parbuluan VI Kab.Dairi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ,maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Pembangunan Infrastuktur di Desa Parbuluan VI, Kab.Dairi?
2. Bagaimana pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Infrastuktur di Desa Parbuluan VI Kab.Dairi?
3. Apakah pemanfatan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastuktur di Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi telah berjalan dengan efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan,maka tujuan yang diinginkan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menggambarkan proses Pembangunan Infrastuktur Desa di Desa Parbuluan VI, Kab.Dairi
2. Mendeskripsikan bagaimana pemamfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Parbuluan VI , Kab.Dairi
3. Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut yaitu mamfaat daro penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bermamfaat dalam pengembanagan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada ADD.

2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini semoga memberikan sumbangsi informasi dan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya .

3. Manfaat bagi pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi dalam mengembangkan program ADD di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi untuk tahun tahun berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Ulum (dalam Ali 2018) menyatakan bahwa suatu rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu monoter disebut sebagai anggaran publik. Dalam artian yang lebih sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang berisikan gambaran mengenai keadaan keuangan dari suatu organisasi yang didalamnya terdapat informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas apa saja yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Menurut Bastian (dalam Putri Restyaningrum 2017) anggaran memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- a Anggaran merupakan hasil dari perumusan rencana kerja sebuah organisasi.
- b Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan setiap lini kerja dan mekanisme kerja antara pimpinan dengan bawahan dalam suatu organisasi.
- c Anggaran sebagai alat dalam proses pengendalian setiap lini kerja
- d Anggaran sebagai alat motivasi dalam pencapaian visi organisasi
- e Anggaran merupakan instrumen politik
- f Anggaran merupakan instrument kebijakan fiscal, dan
- g Anggran sebagai alat evaluasi kinerja setiap pelaksanaan kegiatan

Dalam (Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014) tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan dalam Bab 1 pasal 1 ayat 8 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa lebih lanjut dalam Bab IV Pasal 8 dijelaskan bahwa APBDesa dibagi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan Desa disusun menurut kelompok dan jenisnya.
- b. Belanja Desa disusun menurut kelompok kegiatan dan jenisnya.
- c. Pembiayaan Desa disusun menurut kelompok dan jenisnya

2.1.2 Pengertian Desa

Menurut (UU Nomor 6 tahun 2014) Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya terdapat batas-batas wilayah yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola tatanan pemerintahannya, kepentingan masyarakat didalamnya dengan keikutsertaan ide atau prakarsa masyarakatnya serta hak-hak tradisional masyarakat yang diakui dan dihormati dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa

Dalam sejarah perkembangan manusia, desa diartikan sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan awal sebelum munculnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran serta neraga-negara modern.

Menurut Bintarto (1983), yang menjadi fungsi utama desa terletak pada bidang ekonomi dimana daerah pedesaan menjadi wadah produksi pangan serta komoditi ekspor. Peranan penting ini melibatkan produksi sumber bahan pangan yang sangat menentukan naik atau turunnya pencapaian pembinaan ketahanan nasional.

Dari sudut pandang sosiologis, masyarakat Desa memiliki karakteristik tertentu yang menjadikan desa tersebut berbeda dengan kelompok masyarakat diluar dari desa tersebut. Menurut (Wasistiono, S., & Tahir, 2007) Desa

merupakan persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri dan kekayaan atau pendapatan sendiri. Persekutuan hukum pribumi terkecil namun dapat diartikan juga sebagai persekutuan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dengan secara alamiah di dalam masyarakat pribumi dan didasarkan secara tradisional, dan juga persekutuan hukum, dimana hanya penduduk asli desa tersebut atau dalam skala minimal hanya sebagian besar dari pada penduduk asli menjadi anggotanya.

2.2 Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi desa yang dipindahalihkan dari APBD dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Oleh karena itu, anggaran dana desa harus dikelola oleh aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran dana desa, adapun tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat desa. Menurut (UU No. 6 tahun 2014) tentang desa dijelaskan bahwa dana desa diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf perekonomian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan-pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dana desa merupakan dana yang diterima oleh desa dalam satu periode anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi desa yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota yang berguna untuk membiayai prosese penyelenggaraan pemerintahan di desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana tertulis dalam PP No.60 Tahun 2014 jo PP No.22 Tahun 2015. Anggaran yang berasal dari APBN dikelola dan diklasifikasikan berdasarkan jumlah desa yang ada dan dialokasikan dengan tetap memperhatikan jumlah penduduk yang berada dalam wilayah desa tersebut, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesusahan dalam menjangkau lokasi geografis dalam upaya proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan desa (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015).

Tujuan regulasi dana Desa dalam tujuannya untuk memastikan agar penggunaan dana desa memiliki bagan pergerakan bagi ekonomi, penggunaannya diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa, sehingga konsumsi rumah tangga dapat terjaga.
- b. peningkatan pelayanan dasar berskala, terutama disektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pelaksanaannya mengutamakan melalui swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat, bahan baku lokal, serta kegiatan lainnya yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, 2017).

2.2.2 Pengelolaan Dana

Desa Pengelolaan anggaran dana desa merupakan salah satu tindakan pemerintah desa untuk mengurus dan menata tatanan pemerintahan yang baik (*good Governance*) dalam pengalokasian anggaran dana desa. Lembaga administrasi negara menyimpulkan bahwa wujud dari pemerintahan Negara yang menyatu dan bertanggungjawab, seras efisien dan efektif dengan cara tetap

menjaga sinergi interaksi yang membangun diantara pemangku kepentingan dalam Negara, sektor swasta beserta masyarakat (Sedarmayanti, H., & Dr, 2004).

Pengelolaan merupakan kata yang disangkutpautkan dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola dan lebih sering mengacu pada proses mengatur atau mengerjakan sesuatu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Namun banyak ahli yang memberikan gagasan terkait pengertian pengelolaan tersebut dengan kalimat yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama terkait pengelolaan. Sebagaimana Adisasmita (2006) menyebutkan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan bermanfaat seluruh faktor sumber daya menurut pengelolaan diperlukan dalam menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu.

Sedangkan untuk pengertian manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Drs H. Melayu S.P. Hasibuan, 2016:9). Sehingga dalam proses realisasi pengelolaan anggaran dana desa harus sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa dimana keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa sebagai stimulan, yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperuntukkan kepada desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pemanfaatan ADD untuk pembangunan infrastruktur desa selain harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Dairi No. 6 Tahun 2014 terkait acuan pelaksanaan ADD Kabupaten Dairi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan juga haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan desa, agar pembangunan yang dilaksanakan dapat menjangkau dan dinikmati serta dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik.

2.4 Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan proses yang didalamnya terdapat perubahan atas struktur sosial yang ada ditengah masyarakat, sedangkan menurut Khairuddin (dalam Hendrik 2013) pengertian pembangunan adalah sebuah rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar. Henry (2013:614) menyatakan pembangunan adalah sebagai suatu proses, dimana proses tersebut menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama dan budaya.

(Nyoman, 1991:48) Menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan suatu gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri, hal ini berarti peningkatan taraf hidup masyarakat yang ditentukan oleh diirinya sendiri. Maka pembangunan desa difokuskan pada usaha peningkatan dalam pembangunan merupakan suatu kewajiban.

Menurut (Nyoman, 1991:53-54) menyatakan bahwa terdapat 3 prinsip-prinsip pokok yang mendasari pelaksanaan dalam pembangunan Desa, yaitu:

- a. Pembangunan desa dilaksanakan dengan cara menyatu dengan tetap mengembangkan swadaya dan gotong royong.

- b. Pembangunan desa dipandang sebagai suatu proses, sebagai metode, sebagai program dan sebagai gerakan. (Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki).
- c. Sasaran utama pembangunan desa antara lain mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada, pembangunan ekonomi desa serta pemerataan pembangunan untuk memantapkan ketahanan Nasional.
- d. Pembangunan infrastuktur

Infrastuktur merupakan prasarana publik primer yang penting dalam penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu Negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian. Maka pembangunan sangat dibutuhkan dan harus dikembangkan dalam suatu Negara.

Sedangkan menurut Rahardjo (2006: 19) sedikitnya ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan desa yaitu:

1. Transparansi

Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan.

2. Partisipatif

Partisipasi adalah bentuk dari keinginan untuk pengembangan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari dasar dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

3. Dapat dinikmati masyarakat

Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Indikator yang digunakan

dalam melihat bahwa pembangunan yang berjalan dapat dinikmati masyarakat adalah melalui penilaian bahwa pembangunan yang ada harus sesuai dengan keinginan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kemampuan memberikan hasil kepada pihak terkait yang lebih tinggi atas kinerja atau pencapaian individu atau organisasi terhadap masyarakat.

5. Sustainable (Berkelanjutan)

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang dilakukan secara harmonis serta sangat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan dalam masyarakat. Dari pemaparan beberapa prinsip di atas terdapat beberapa kesamaan antara prinsip pembangunan yang dikemukakan oleh Rahardjo (2006) dengan prinsip pemanfaatan alokasi dana desa dalam peraturan Bupati Tuban No 20 Tahun 2015 tentang pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa.

2.5 Konsep Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2004), Efektivitas adalah hasil perhitungan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan organisasi tersebut dikatakan telah bergerak dengan baik dan efektif. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan Efektivitas adalah alat ukur dalam melihat tingkat kinerja organisasi

dalam pergerakannya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi. Sehingga efektivitas dapat diartikan apabila usaha yang dilaksanakan atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

2.6 Ukuran Efektivitas

Tingkat rendahnya efektivitas juga dapat diketahui dengan membandingkan sebuah rencana yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dilakukan. Menurut S.P. Siagian (1978) kriteria penilaian terhadap pencapaian tujuan tersebut efektif atau tidak ditentukan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini diperlukan untuk pengendalian karyawan dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai sasaran dan tidak keluar dari tujuan organisasi sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan yang jelas, telah diketahui bahwa strategi merupakan jalan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para pelaksana tugas tidak salah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan haruslah dapat menjadi sebuah jembatan untuk tujuan-tujuan dengan usaha usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada dasarnya berarti mengambil keputusan terkait apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

5. Penyusunan program yang tepat, memberikan penjelasan terkait program-program pelaksanaan yang tepat, karena jika itu tidak dilaksanakan maka kemungkinan besar para pelaksana kerja akan kurang memiliki acuan dasar untuk bertindak dan bekerja.
6. Adanya sarana dan prasarana kerja, yang menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas organisasi adalah adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai sehingga kemampuan bekerja secara produktif dapat tercapai.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, program yang baik namun tidak dijalankan secara efektif dan efisien maka dapat saja menimbulkan problem sehingga tidak akan mencapai sasaran yang telah ditentukan, karena dengan pelaksanaan efektif dan efisien organisasi semakin didekatkan pada tujuan organisasi tersebut.

2.7 Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian terdahulu dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul	Objek /Analisis	Hasil
1.	Rohma dan Ma'ruf (2016)	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan, Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban	Objek: Kecamatan Semanding, Kab. Turban Analisis: Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Desa Bektiharjo sudah berjalan dengan baik, namun pada beberapa variabel tertentu masih sangat kurang. Pada variabel transparansi menunjukkan bahwa

				pemerintah Desa Bektiharjo dalam melakukan pembangunan infrastruktur masih belum transparan, karena belum mampu menyediakan fasilitas dan akses informasi yang mudah untuk masyarakat.
2	Takaliuang, Tulusan dan Sondakh (2014)	pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa Didesa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Objek: Kec. Pinogaluman Kab. Bolaang Mongondow Utara Analisis: Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian tersebut di simpulkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa Alokasi (ADD) sebagai pengganti penggunaan dana pembangunan / Kecamatan Desa dapat meningkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Tanjung Sidupa. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian disarankan beberapa hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan. 2. Membuat papan pengumuman di setiap desa mengumumkan laporan pelaksanaan

				penggunaan ADD agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.
3.	Repi, Olfie L. S., Timban (2015).	Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan melalui PNPM-PPIP di Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan	Objek: Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis :Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi berada pada kategori sedang. Dalam tahap perencanaan sebagian besar responden kurang aktif dalam berpartisipasi dengan alasan sibuk bekerja. Tahap pelaksanaan responden terbanyak berada pada tidak aktif berpartisipasi dengan alasan panitia program pembangunan infrastruktur perdesaan tidak konsisten dengan hasil rapat atau keputusan yang diambil dalam tahap perencanaan berbeda dengan pelaksanaannya.
4.	Boedijono, Wicaksono, Puspita, dll. (2019)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso	Objek: Kabupaten Bondowoso Analisis : Penggabungan analisis kualitatif dan Kuantitatif.	Hasil penelitian ini adalah secara umum desa yang berada di Kabupaten, Bondowosotelah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang

				mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya. Pembahasan dan implikasi temuan di bahas dalam artikel.
--	--	--	--	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Pemanfaatan ADD Di Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi didasarkan pada peraturan Bupati No 15 tahun 2012 tentang pemanfaatan ADD. Melalui ADD, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pemanfaatan ADD harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pemanfaatan ADD dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, Sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Akan tetapi, dalam proses Pemanfaatan ADD yang ada Di Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi belum sesuai dengan prinsip pemanfaatan ADD sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan ADD itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Kondisi inilah yang akan diteliti Di Desa Parbuluan Kab.Dairi, terkait dengan bagaimana efektifitas pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Parbuluan VI dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi .

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan pada skema di bawah ini:



Gambar 2. 1Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2015:207) penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis, serta akurat.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Dalam pengambilan data dan informasi maka lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi.

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada Tanggal, 17 agustus s/d 17 september 2020 dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Berikut tabel dari rencana penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Rencana Waktu Penelitian

No	Keterangan	Tahun 2020					Tahun 2021							
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Pra riset													
2	Pengajuan Judul													
3	Bimbingan Proposal													
4	Seminar													

	Proposal													
5	Pengumpulan Data													
6	Bimbingan Skripsi													
7	Seminar Hasil													
8	Sidang													

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi adalah sebuah kumpulan dari keseluruhan objek ataupun subjek yang memiliki karakteristik tertentu sehingga menjadi perhatian peneliti untuk dianalisis dan sehingga diambil sebuah kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

3.2.2 Sampel

Sampel Menurut (Sugiyono, 2010:81), Sampel adalah sebagian dari keseluruhan yang terdapat didalam sebuah Populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) pada sektor pembangunan infrastuktur desa.

3.3 Defenisi Operasional

Definisi operasional dan pengukuran variabel diuraikan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 2
Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Teknik Wawancara
1.	Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (X)	Kerja Tim Pelaksana. Pemanfaatan merupakan turunan dari kata “manfaat” yakni suatu penghadapan yang menunjukkan kegiatan menerima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketetapan dalam pencapaian tujuan/ sasaran 2. Penggunaan ADD yang sesuai 3. Kemampuan tim pelaksana 	Terstruktur
2.	Pembangunan Infrastruktur (Y)	Menurut P. siagian pembangunan infratraktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas jalan 2. Pelebaran jalan 3. Pembangunan jalan baru 4. Pembangunan jembatan 5. Terbukanya akses jalan. 	Terstruktur

		terselenggaranya suatu proses pembangunan dan peningkatan perekonomian.		
--	--	---	--	--

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang di peroleh dari hasil wawancara sederhana berkaitan dengan pengelolaan APBDes untuk pembangunan desa dengan narasumber yaitu perangkat Desa Parbuluan VI. Data yang diperoleh adalah data yang terkait tentang pengelolaan APBDes berupa pendapatan dan belanja Desa Parbuluan VI.

3.4.2 Sumber Data

Data bersumber dari data sekunder yang dapat diartikan sebagai data yang telah diolah dan dikelolah dan diperoleh dari Desa dalam bentuk dokumen seperti, profil Desa, sejarah Desa, stuktur organisasi Desa, Laporan rencana pembangunan desa , dan laporan pertanggungjawaban dari Desa Periode tahun 2017- 2019 yang sesuai dengan Pemanfaatan ADD,dalam bentuk anggaran dari Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan :

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada pihak Desa dengan cara melakukan Tanya jawab dengan narasumber atau informan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Esterberg (2002) dalam sugiyono

(2007:412) menyatakan bahwa wawancara terstruktur yaitu dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa dan aparat desa yang berperan penting dengan penyusunan Anggaran. Dalam wawancara terstruktur tersebut, peneliti dapat memiliki gambaran awal mengenal pembangunan yang ada di Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi.

2. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anggaran desa yang beerfokus dengan judul yang diambil oleh peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2010:207). Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis metode deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Parbuluan VI Kab. Dairi, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Proses pelaksanaan pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur telah efektif dan terealisasi sepenuhnya, dalam tahapan proses pelaksanaan pemanfaatan alokasi dana desa, di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi oleh aparat desa terlihat sudah berjalan dengan baik, tetapi masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan, sehingga tidak terbentuknya aksesi formasi bagi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi.
2. Pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi, dalam penyusunan anggaran bersifat transparan dan aksesi pemerintah harus memiliki sifat terbuka dalam penyusunan anggaran kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur sudah efektif.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggungjawaban sudah efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun oleh pemerintah Desa Parbuluan VI Kab. Dairi dengan baik dan secara rinci, dan telah sesuai dengan alokasi dana desa yang diterima untuk dikelola Desa Parbuluan VI Kab. Dairi.

5.2 Saran

Ada beberapa saran pokok peneliti untuk lebih meningkatkan Analisis efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastuktur Desa Parbuluan VI Kab. Dairi yaitu sebagai berikut:

1. Harus adanya keterlibatan elemen masyarakat dan kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastuktur desa, sehingga sasaran dari pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat
2. Pemerintah Desa Parbuluan VI lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) maupun keterampilan masing-masing bidang dalam hal pertanggungjawaban alokasi dana desa kepada masyarakat, serta memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggran alokasi dana desa , dan mempunyai hak untuk mengetahui anggaran alokasi dana desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu.
- Ali, M. (2018). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa*. 01(01), 1689–1699.
- Beratha, i N. (1991). *Pembangunan desa berwawasan lingkungan*. Bumi Aksara.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20.
- DPR RI. (2016). *Desa*. 1, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Drs H. Melayu S.P. Hasibuan. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara.
- Hendrik, O. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 459–469.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 113.
- Negara, K. S. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. *Law*, 18(2), 4–6.
- Pemerintah, P. (2005). *Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum & Humas BPKP*. 1–3.
- Peraturan Bupati No. 15*. (2012).
- Putri Restyaningrum. (2017). *PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat)*.
- Rohmah, K. T., & Ma'ruf, M. F. (2016). Alokasi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Sosiologi*, 01, 1–11.

Sedarmayanti, H., & Dr, M. P. (2004). *keperintahan yang baik*.

Sugiyono, P. (2010). *Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung. Alfabeta.*

Undang-Undang No 6 Tahun 2014, T. D. (2014). Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Dpr, 1, 45–54.*

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr, 249.*

Wasistiono, S., & Tahir, I. (2007). (2007). *Prospek Pembangunan Desa*. Fakultas Media.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Hasil Rekapitulasi Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA INFORMAN : J. SIHOTANG
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
USIA :45 Tahun
STATUS :MENIKAH
PEKERJAAN :KEPALA DESA
ALAMAT :SIHOTANG NAHORNOP

Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Desa

1. Peneliti : Bagaimana tahapan penyusunan APBDes di Desa Parbuluan VI ?
Kepala Desa : Penyusunan APBDes dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :
 - a. Pertama sekali dilakukan Musyawarah Dusun (MUSDUS) setiap dusun yang ada
 - b. lalu dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (MUDES) bersama dengan seluruh kepala dusun yang ada, tokoh masyarakat, beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - c. Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.
 - d. lalu hasil RKPDes diajukan ke kabupaten
 - e. lalu dilakukannya penentuan skala prioritas oleh Kepala Desa beserta BPD
 - f. Selanjutnya di evaluasi kembali oleh pihak Kabupaten setelahnya ditetapkan
2. Peneliti : Apakah MUSREMBANG yang dilakukan sudah cukup efektif dalam menampung pendapat masyarakat ?

Kepala Desa : : selama dilaksanakannya selama ini hasilnya sudah cukup menampung aspirasi masyarakat, namun kita harus melaksanakan yang namanya skala prioritas, dimana hal yang terpenting harus diutamakan dalam pembangunan desa

3. Peneliti : Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam bidang pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa?

Kepala Desa : Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu pada bagian infrastruktur ada 5 bagian yaitu, pengadaan jalan, pembukaan jalan, perehapan jalan, pengerasan jalan, dan pengaspalan jalan.

4. Peneliti : Apakah pemerintah sudah melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk setiap dusun?

Kepala Desa : iya, itu sih sejalan dengan pembangunan desa, dan untuk saat ini pembangunan infrastruktur sangat kita perhatikan untuk pemerataan pembangunan di desa ini.

5. Peneliti : Apakah program tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ? apa hasil yang didapat dari peningkatan atau perbaikan infrastruktur tersebut ?

Kepala desa : semua program yang kita laksanakan mengutamakan usulan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat dengan begitu dapat dipastikan hal tersebut telah sesuai dengan keinginan masyarakat.

6. Peneliti : Apakah tahapan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan lancar?

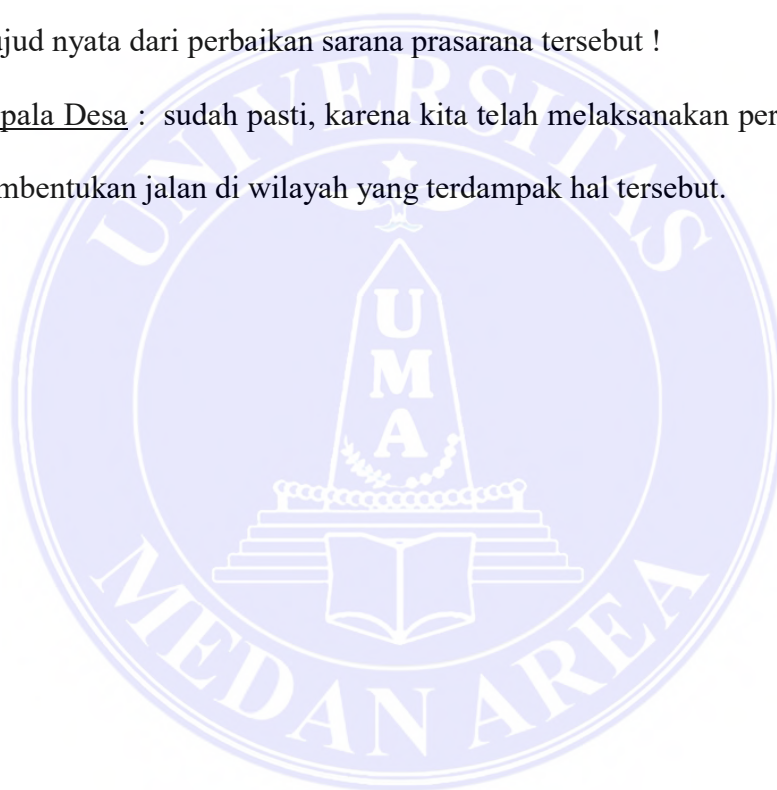
Kepala desa : Mengenai pembangunan infrastruktur sudah sepenuhnya terlaksana, dan dana yang diberikan untuk desa baik dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Deda (ADD), dan penghasilan desa sudah digunakan sesuai dengan peraturan Bupati no.15 tahun 2012.

7. Peneliti : Apakah pelaksanaan alokasi dana desa yang tertung dalam peraturan daerah kabupaten Dairi No. 6 tahun 2008 sudah direalisasikan dalam bentuk program kerja?

Kepala Desa: Tujuan dari alokasi dana desa (ADD) tertuang di dalam Perda Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib, taat kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

8. Peneliti : Apakah ada usaha pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur sarana prasarana desa ? bisakah anda jelaskan wujud nyata dari perbaikan sarana prasarana tersebut !

Kepala Desa : sudah pasti, karena kita telah melaksanakan perbaikan bahkan pembentukan jalan di wilayah yang terdampak hal tersebut.



PEDOMAN WAWANCARA

NAMA INFORMAN : R. NADEAK
 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
 USIA :37 Tahun
 STATUS :MENIKAH
 PEKERJAAN :KAUR PERENCANAAN
 ALAMAT :JALAN TRUK

Daftar Pertanyaan untuk Kaur Perencanaan/ Penyusun Anggaran.

1. Peneliti :Bagaimana mekanisme pengelolaan alokasi dana desa?

Kaur Perencanaan :Perencanaan dimulai dari musrembang desa, kemudian berjalan terus menjadi musyawarah kecamatan dan kabupaten. Kemudian ini akan menjadi hasil RKP (rencana kegiatan pemerintah). Dari RKP ini merupakan usulan- usulan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk RPJDes (rencana jangka panjang desa) yang periodenya selama 5 tahun kepala desa menjabat, yang diambil skala prioritas dan kemudian akan direalisasikan disetiap tahun yang diselaraskan dengan RKP.

2. Peneliti :Apakah telah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?

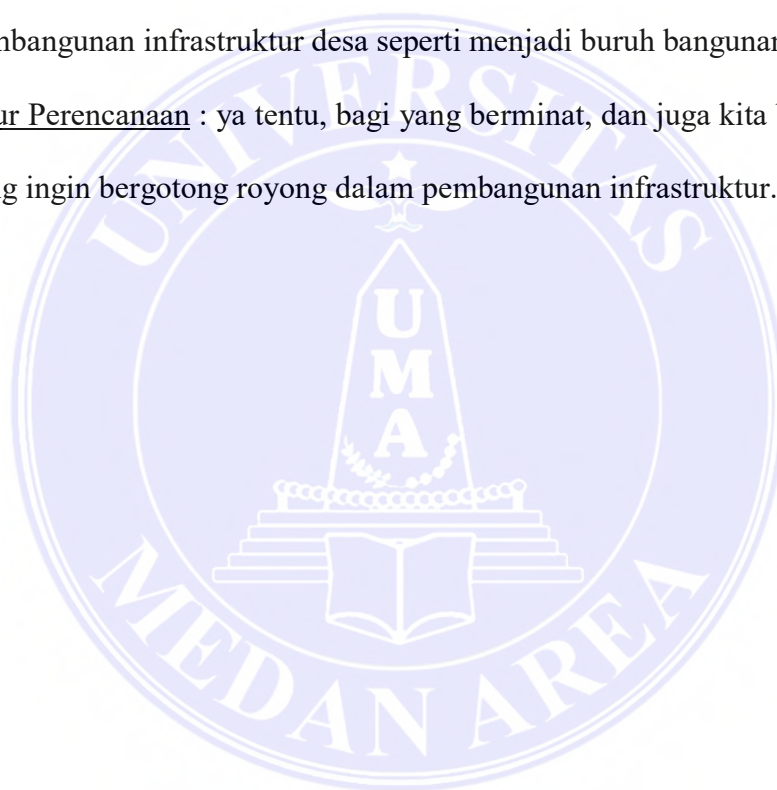
Kaur Perencanaan: Sudah banyak yang sesuai, dan kemungkinan 100% sesuai, tetapi jika ada kendala seperti bencana mungkin tidak bisa 100% sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan perlu untuk dirubah sedemikian menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi langsung dalam lapangan.

3. Peneliti :Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan?


Kaur Perencanaan : Yang paling banyak kendala adalah ketika adanya suatu bencana alam, dan partisipasi masyarakat yang menuurn dalam mengerjakan pembangunan seperti jalan, jembatan, atau yang lainnya. Karena ada kendala yang menjadi sebab dan akibat diluar apa yang sudah menjadi rencana pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa secara menyeluruh dan baik.

4. Peneliti: Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa seperti menjadi buruh bangunan ?

Kaur Perencanaan : ya tentu, bagi yang berminat, dan juga kita buka juga bagi yang ingin bergotong royong dalam pembangunan infrastruktur.



Lampiran 2 Surat Research



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Rampus I : Jl. Kulam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366079, 7360160, 7364340, 7366781, Fax (061) 7366998
Rampus II : J. Sei Seryu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax (061) 8226331
Email : unma.medanarea@uma.ac.id Website:uma.ac.id/ekonomi@uma.ac.id email fakultas ekonomi@uma.ac.id

Nomor : **41 / FEB FEB.2 / 01.1 / 1 / 2021** 28 Januari 2021
Lamp. :
Perihal : **Izin Research / Survey**

Kepada, Yth ,Pimpinan
Desa Parbuluan VI Kab. Dairi

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan,
mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :


Nama : ELIDA SIHOTANG
N P M : 178330210
Program Studi : AKUNTANSI
Judul : Analisis Efektifitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bid. Akademik



Redi Priadi, SE, M. Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

